

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Zulhendra dan Bunga (2022:35) Sistem informasi akuntansi penggajian hendaknya dilaksanakan seefisien mungkin sehingga memudahkan pada pengambilan keputusan untuk kepentingan personal. Apabila sistem informasi akuntansi tidak berjalan dengan optimal, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi operasional suatu instansi. Dalam ranah institusi pemerintahan seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo, sistem informasi akuntansi penggajian memegang peranan krusial dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan akuntabel.

Menurut Liliani dan Gede (2022:23) Sistem informasi akuntansi penggajian memiliki peran penting bagi sebuah dinas dalam mendeteksi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggajian, seperti keterlambatan pembayaran atau kesalahan yang berdampak besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan terhadap kinerja dan operasional instansi tersebut. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sistem akuntansi penggajian meminimalkan resiko keluhan atau kesalahan pegawai dengan memastikan bahwa gaji pegawai telah ditentukan secara akurat berdasarkan data yang tersedia.

Penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari elemen vital pada sistem keuangan pemerintahan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan dalam pengelolaannya. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini digunakan sistem informasi akuntansi penggajian yang telah terhubung dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat pelaporan, pelaksanaan, dan perencanaan keuangan daerah.

Selain itu, didalam aplikasi SIPD terdapat fitur-fitur yang dapat membantu mempermudah administrasi kepegawaian, mulai dari pendataan sampai dengan penyampaian data yang akurat. Dapat dianalisis dengan baik dengan sistem yang terintegrasi, sehingga dapat mengurangi resiko permasalahan yang terjadi pada sistem manual. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai menerima gaji yang sesuai dan tepat waktu.

Menurut Prisna dan Kusmilawaty (2022:12) Salah satu elemen krusial dalam proses akuntansi penggajian yang memiliki kaitan dengan masalah pengelolaan gaji pegawai adalah penerapan sistem informasi akuntansi penggajian. Penggunaan sistem ini dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam instansi atau organisasi, sehingga mampu mencegah potensi kerugian dan mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

SIPD dan akuntansi saling berkaitan dalam penyelenggaraan sistem informasi akuntansi penggajian, pengelolaan aset, dan laporan keuangan. SIPD mencatat atau mendigitalkan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pada akuntansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, SIPD tidak hanya sekedar perangkat teknis, melainkan merupakan komponen penting dari sistem akuntansi pada keuangan daerah yang menjunjung tinggi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam transaksi keuangan publik.

Menurut Yusuf dan Hendra (2022:64) Ketika suatu dinas atau instansi tidak memiliki sistem penggajian yang berjalan secara optimal, hal tersebut dapat menimbulkan risiko terjadinya penyimpangan atau kebocoran dalam pelaksanaan tugas. Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen yang wajib dijunjung tinggi.

Menurut Septiningtyas (2021:04) Transparansi adalah kemampuan pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat, dan mudah untuk diakses publik, terutama terkait kebijakan, prosedur, serta kegiatan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas adalah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan, penggunaan anggaran, dan hasil kerja kepada publik. Melalui aplikasi SIPD, pihak yang berwenang juga dapat mengaksesnya informasi dengan mudah. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang, dan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri menjadi platform wajib bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, penerapan penuh SIPD masih menghadapi kendala teknis yang signifikan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, gangguan pada SIPD menghambat proses penginputan data dan realisasi anggaran perubahan tahun 2024, yang berdampak pada keterlambatan pencapaian target di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kendala ini semakin dirasakan karena tahun tersebut merupakan kali pertama Pemda Kutai Timur sepenuhnya menggunakan SIPD, setelah sebelumnya menggunakan sistem campuran. Gangguan sistem, kesalahan pemrosesan, dan kesulitan akses membuat kinerja pemerintah daerah terhambat, bahkan memengaruhi efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persoalan serupa juga dialami oleh daerah lain, baik di wilayah Kalimantan Timur maupun di luar daerah, menunjukkan bahwa permasalahan SIPD bersifat nasional dan

memerlukan evaluasi serta perbaikan sistem agar dapat menunjang proses akuntansi dan pelaporan keuangan secara optimal.

Di Kabupaten Kutai Timur. Sejumlah perangkat daerah mengeluhkan lambatnya kinerja sistem yang berdampak pada proses pencairan dana kegiatan. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Insan Bowo Asmoro, menyoroti keterbatasan SIPD yang dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketika terjadi masalah atau error, proses deteksi dan penanganannya tidak mudah dilakukan di tingkat daerah.

Kondisi ini berbeda dengan sistem lokal yang lebih cepat dalam pengecekan dan perbaikan kendala teknis. Lambatnya proses loading dan seringnya error pada SIPD dikhawatirkan menghambat pencairan dana serta mengganggu penjadwalan kegiatan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri untuk meminta klarifikasi dan solusi atas permasalahan ini. Hambatan teknis tersebut menjadi tantangan serius karena berdampak langsung pada realisasi anggaran dan keberlangsungan program kerja pemerintah daerah.

Sedangkan Di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya jumlah pegawai yang telah mendapatkan pelatihan penggunaan SIPD-RI, sehingga sebagian besar bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memahami cara mengoperasikan sistem tersebut secara optimal. Selain itu, keterbatasan jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota, turut menghambat proses penginputan data dan pelaporan keuangan daerah.

Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam realisasi program dan pencairan anggaran, serta memaksa pemerintah daerah mencari solusi alternatif

seperti memfasilitasi bendahara distrik untuk melakukan input data langsung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi SIPD-RI, sehingga perlu adanya evaluasi, peningkatan kapasitas pegawai, dan perbaikan sarana pendukung agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Kabupaten Ponorogo, khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), yang juga telah mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan keuangan, termasuk sistem akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai sistem yang terintegrasi, SIPD diharapkan mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi proses penggajian mulai dari perencanaan anggaran, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM).

Namun, adanya potensi kendala teknis, dapat memengaruhi kelancaran proses tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai penerapan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis SIPD di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dapat tercapai, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam praktiknya.

Menurut Maulani dkk (2024: 1415) Penerapan SIPD dengan penekanan secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di dalam fase implementasi APBD Tahun Anggaran 2021, sejumlah Pemerintah daerah telah mulai menerapkan

penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) versi yang sudah dilakukan disesuaikan untuk meningkatkan responsivitasnya.

Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah lewat instansi Kementerian Dalam Negeri menetapkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perannya sebagai suatu mekanisme resmi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, termasuk di dalamnya sistem informasi akuntansi penggajian. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua lembaga atau instansi mampu mengimplementasikan SIPD secara optimal, baik dari segi sumber daya manusia, pemahaman teknis, maupun infrastruktur.

Akan tetapi, meskipun SIPD memiliki potensi yang besar, pelaksanannya sering kali menghadapi berbagai kendala, baik pada teknis maupun kebijakannya. Seperti integrasi data, infrastruktur teknologi yang belum memadai, juga dapat menghambat efektivitas sistem tersebut. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah kebijakan yang tidak konsisten dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan penggunaan sistem tersebut.

Pada penerapan aplikasi SIPD sering mengalami kegagalan, untuk memastikan bahwa sistem dapat diimplementasikan secara baik, sangat penting untuk melakukan pelatihan dan pengembangan dalam menggunakan teknologi baru. Tanpa adanya dukungan dan pemahaman pada pegawai, penerapan aplikasi SIPD tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap kemajuan manusia, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menerapkan sistem akuntansi penggajian yang efisien dan efektif. Analisis saat ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kekuatan yang ada dan untuk memberikan rekomendasi

perbaikan yang tepat. Penelitian ini juga dilakukan karena pentingnya metode pengelolaan penggajian yang efektif dan efisien untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pada proses administrasi keuangan daerah.

Menurut Septiani dan Neneng (2024:194) Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah yang lebih responsif, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh yaitu melalui pemanfaatan penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah. SIPD sendiri merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan keterbukaan administrasi pemerintahan, termasuk terkait dengan upaya meningkatkan performa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inisiatif penting dalam mendorong efisiensi serta keterbukaan dalam administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, penerapan SIPD diharapkan mampu menjadi solusi efektif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses pengawasan dan pengelolaan PNS.

Menurut Harahap dan Sigalingging (2024:26) Pengelolaan gaji pegawai merupakan elemen krusial karena menyediakan informasi terkait perhitungan upah dan tunjangan yang diterima setiap bulan. Sistem penggajian yang terstruktur dengan baik dapat mendukung peningkatan kinerja instansi serta memberikan dampak positif terhadap kepuasan pegawai. Besaran gaji yang diterima tiap pegawai bervariasi, disesuaikan dengan posisi jabatan dan jenis pekerjaan yang diemban dalam instansi tersebut.

Sistem informasi akuntansi yang baik dan akurat sangat penting untuk memastikan keakuratan gaji, mengidentifikasi masalah pencatatan, dan meningkatkan efisiensi kerja, namun dengan penggunaan aplikasi SIPD sering kali menimbulkan masalah seperti keterbatasan SDM, kesalahan input, dan bahkan kurangnya pelatihan teknis, oleh karena itu, perlu dilakukan analisis efektivitas, kendala, dan perbaikan sistem informasi akuntansi penggajian khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.

Di samping itu, memahami pengaruh penggunaan aplikasi SIPD terhadap kinerja instansi juga menjadi hal yang penting. Dengan penerapan sistem yang terintegrasi dengan baik, proses pengelolaan penggajian diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dan transparan, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan dan kinerja pegawai. Dalam konteks administrasi pemerintahan, sistem informasi akuntansi perlu ditinjau secara berkala guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang terus berkembang serta untuk menjamin sistem tetap relevan dan adaptif.

Menurut Septiani dan Neneng (2024:194) SIPD mulai dibentuk pada Oktober 2019 sebagai tindak lanjut dari merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem informasi akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan platform informasi yang mengintegrasikan data terkait pembangunan daerah, kondisi ekonomi daerah, serta berbagai informasi pemerintahan lainnya, yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penggunaan SIPD pada sistem akuntansi penggajian mulai digencarkan beberapa tahun lalu, bertepatan dengan transformasi digital sektor pemerintahan. Dengan latar belakang ini, dilakukan penelitian terhadap sistem SIPD sebagaimana yang sudah aktif dan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan proses penggajian.

Menurut Maulani dkk (2024:1416) Peningkatan efisiensi operasional, transparansi, serta transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Penelitian ini menawarkan solusi berupa pendekatan sistematis terhadap penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang berbasis pada aplikasi SIPD di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Analisis ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana aplikasi SIPD telah diterapkan secara efektif dalam mendukung proses penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, yang merupakan salah satu instansi daerah dengan peran penting. Instansi ini memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan manajemen kepegawaian, khususnya bagi pegawai aparatur negara yang menjalankan tugas di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Pemilihan lokasi penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo didasarkan pada hasil observasi yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan sistem informasi akuntansi penggajian melalui aplikasi SIPD. Di samping itu, kemudahan dalam mengakses data serta kelancaran proses pengumpulan informasi turut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi penelitian ini.

Menurut Afifah dkk (2023:172) SIPD merupakan sistem berbasis elektronik yang menyajikan data serta informasi terkait proses pembangunan, yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsional maupun kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini turut bertujuan untuk menemukan dan mengenali berbagai kendala atau tantangan yang terjadi dalam proses penerapan aplikasi SIPD. Dengan memahami permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan solusi yang lebih efektif guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenali berbagai hambatan yang timbul selama pelaksanaan aplikasi SIPD. Dengan mengkaji permasalahan yang ada, diharapkan dapat dirancang solusi dan strategi yang lebih optimal dalam mengatasinya. Upaya ini sangat penting agar penerapan sistem informasi dapat berjalan dengan efektif, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Yusuf dan Hendra (2022:64) Sumber daya manusia, yang dalam konteks dinas atau instansi dikenal sebagai pegawai, memegang peranan krusial dalam setiap lembaga pemerintahan. Mereka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui peran aktif, pemikiran, dan tenaga yang diberikan. Oleh karena itu, kesiapan SDM merupakan elemen krusial yang perlu mendapat perhatian khusus.

Penelitian ini melibatkan subjek berupa bendahara gaji, operator SIPD, serta staf atau pegawai yang menangani keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Mereka memiliki keterlibatan langsung dalam proses input data, pengelolaan, hingga pelaporan dalam sistem penggajian.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dengan Aplikasi SIPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana penggunaan aplikasi SIPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
2. Mengidentifikasi kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.
3. Mengidentifikasi Kelemahan dan Kekuatan penggunaan aplikasi SIPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan berfungsi sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo guna meningkatkan sistem informasi akuntansi penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan informasi tambahan terkait sistem informasi akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

